

DAFTAR PUSTAKA

- Ang, D. N. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Perluasan Alat Bukti Penyadapan Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Lex Crime/*, Vol.IV/No.
- Anggraeni, N. (2016). Rekaman Vidio CCTV (Close Circuit Television) Dalam Pembuktian Acara Pidana. *Al-Mizan / 1907-0985*, Vol.12 No.
- Asshiddiqie, J. (2009). *Menuju Negara Hukum Yang Demokrasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Bastoni, A. (2015). *Kuhap Lengkap* (kesembilan). Jakarta: Sinar Grafika.
- Christianto, H. (2016). Tindakan Penyadapan Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana. *Hukum Prioris /*, Vol.5 No.2.
- Darmodiharjo, darji & shidarta. (2016). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum* (kelima). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamali, R. A. (2014a). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Djamali, R. A. (2014b). *Pengantar Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali pers.
- Fachmi. (2011). *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia Publishing.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthfah, D. (2015). Perlindungan Negara Terhadap Keamanan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional Studi Kasus Penyadapan Indonesia Oleh Australia. *Hukum Prioris*, Vol.4, No.
- Makarim, E. (2010a). Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan/ 0125-9687*, 2 April-Ju, 231.
- Makarim, E. (2010b). Analisis Terhadap Kontroversi Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Intersepsi Yang Sesuai Hukum (Lawful Interception). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan/ 0125-9687*, No. 2 Apri.
- Manthovani, R. (2015a). *Penyadapan VS Privasi*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Manthovani, R. (2015b). Penyadapan Vs. Privasi. In *Penyadapan Vs. Privasi* (pp. 1–5). Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Prasetyo, eko surya, T. ohoiwutun & H. (2018). Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik. *Lentera Hukum/ 2621-3710*, VOL.5 , 20, 183.
- Prasetyo, T. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan,kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengolahan lingkungan. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam/ 1829-9067*, XV,No.1 Ju, 28.
- Samad, A. (2014). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Siregar, E. (2011). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum* (13th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Ke-17th ed.). Bandung: ALFABETA,CV.

Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Wahyudi, T. S. (2012). Konsekuensi Yuridis Penyimpanagn Kewenangan Intersepsi oleh Penegak Hukum. *3274hukum Dan Peradilan / 2303-, Vol1.No.1,,*